**ARTIKEL**

**STRATEGY PUBLIC PRIVATE**

**PARTNERSHIP DALAM PROYEK PLTP PATUHA UNIT 2**

Dedy Agus Purwanto, M. Didi Turmudzi, Bambang Heru Purwanto

Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

**Dedy Agus Purwanto**

**NPM : 189020035**



**PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2022**

Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada suatu permasalahan berkaitan dengan dalam kelemahan penyediaan infrastruktur pelayanan publik dalam Proyek PLTP Patuha 2 di Kabupaten Bandung bahwa, dalam pelaksanaannya belum berjalan secara efektif dari sisi koordinasi. Maka Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi *Public Private Partnership* (PPP) dan Koordinasi Sektor Publik dalam Proyek PLTP Patuha 2 Kabupaten Bandung agar berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dan data dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Public Private Partnership (PPP) dan Koordinasi Sektor Publik belum berjalan secara efektif maka diperlukan strategi Public Private Partnership dan Koordinasi Sektor Publik dalam Proyek PLTP Patuha Unit 2 Kabupaten Bandung dapat berjalan secara efektif jika secara optimal dengan menambahkan dimensi sebagai alat ukur atas dasar analisis SWOT yaitu 1) planning coorporate; 2) Cost Alternative; 3) Network Government; 4) Communication.

Kata Kunci**:** Public Private Partnership, Koordinasi Sektor Publik, Proyek PLTP Patuha 2.

Abstract

This research is based on a problem related to the cooperation scheme in the provision of electricity infrastructure for the Patuha 2 PLTP Project in Bandung Regency that, in its implementation, has not been carried out effectively in terms of coordination from each stakeholder involved. So the purpose of this study is to explain the conditions of the previous cooperation that was built, analyze the constraint factors in the implementation of PPP and find a strategy for improving the implementation of PPP-based Public Private Partnership (PPP) in the Patuha 2 PLTP Project, Bandung Regency so that it can run effectively for the smooth provision of electricity infrastructure for the wider community.

This study uses a qualitative approach with descriptive analysis method. Determination of informants used in this study was a purposive technique on key informants, data collection techniques were carried out through observation, interviews, literature studies and documentation studies. For data analysis, Miles and Huberman's interactive model consists of three streams of analysis activities simultaneously, namely: data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification is done by means of source triangulation.

The results of the study indicate that the cooperative relationship between the stakeholders involved has not been implemented properly, including the existence of differences in perceptions among the stakeholders involved. Basically, several elements related to Public Private Partnership (PPP) based on Public Sector Coordination have not yet been fulfilled, including 1) Mapping Coordination Instruments, 2) Presenting changes over time, and 3) Analyzing changes in coordination mechanisms over time where there is no written evidence of documentation with good. In practice, the need for a PPP strategy based on Public Sector Coordination in the PLTP Patuha Unit 2 Bandung Regency project to run effectively, by adding dimensions as a measuring tool on the basis of a SWOT analysis, namely: 1) Planning Coorporate, all of which are related to planning documents made careful and comprehensive; 2) Cost Alternative, strengthening business capital and opening up breakthrough opportunities in addition to having selected cooperating investors; 3) Network Government, togetherness both government, private and community shows support in the implementation of public services; 4) Communication, a high level of commitment and consistency for the success of the program. In conclusion, this approach provides outputs related to the strategies implemented, including: 1) Mapping Strategy for Social and Cultural-based Coordination Instruments; 2) Disclosure of financial planning information and information in the field; 3) Stages of analyzing changes to the coordination mechanism; and 4) Integration of different vision, mission & organizational culture of the partnerships involved.

Keyword: Public Private Partnership. Public Sector Coordination, Project PLTP Patuha 2

1. **INTRODUCTION**

Di era globalisasi, komitmen pemerintah untuk menjawab tuntutan masyarakat berupa pembangunan infrastruktur, yaitu sarana dan prasarana yang melayani kebutuhan masyarakat (Djajuli, 2018). Infrastruktur sangat penting untuk mendorong ekspansi ekonomi dan mencapai pembangunan yang optimal. Aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur akan berdampak pada efisiensi, keberlanjutan, dan ketepatan operasi produksi dan distribusi (Rifai, 2016). Oleh karena itu, hal ini signifikan dan mendukung tingkat perekonomian, mengharuskan pemerintah untuk menyediakan semua jenis infrastruktur dasar dan fasilitas pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat (Siswanta & Haryanto, 2017).

Pembangunan infrastruktur publik seringkali dipasok dan dibangun oleh pemerintah, sedangkan infrastruktur semi-swasta dan swasta biasanya dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), namun dapat juga dikembangkan oleh swasta atau badan usaha koperasi ( Maramis, 2018). Namun, dalam upaya pemerintah untuk memenuhi infrastruktur dan juga sebagai penyedia layanan publik, tidak cukup hanya mengandalkan keahliannya; memiliki sumber daya yang terbatas, baik dari anggaran pemerintah maupun sumber daya sendiri (Hutagalung & Hermawan, 2018). Di sisi lain, ada tuntutan dari masyarakat akan pelayanan publik yang prima; pelaksanaannya transparan, dengan proses yang cepat dan biaya yang adil; dan kebutuhan ini terus muncul secara berkala (Rukayat, 2017).

Di masa lalu, model pelayanan publik memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah yang merupakan pemasok tunggal (Fatmawati, 2011). Dalam rangka membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana sarana dan prasarana sebagai wujud nyata pemerintahan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah harus mensinergikan kebutuhan untuk berkolaborasi dengan pihak lain, termasuk swasta dan masyarakat (Fauzela, 2007). Sutiyoso, & Putra, 2019). Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibuatlah model Public Private Partnership, dimana pemerintah dapat melakukan pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan masyarakat melalui pola kerjasama, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (Ayu et al, 2021) .

Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) sebagai mekanisme stimulus berkontribusi pada pengadaan yang lebih efektif dan menawarkan sumber investasi baru yang telah diadopsi secara luas di seluruh negeri, terutama di negara-negara industri. Dalam hal ini, sebagai kemitraan kontrak yang dapat menentukan secara rinci tugas dan kewajiban masing-masing mitra dalam kerangka pembangunan infrastruktur seperti yang dijelaskan dalam kontrak (Akintoye, Beck, dan Mohan, 2016). Dalam kontrak kerjasama, bentuk kerangka perjanjian dan segala kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dijabarkan secara tegas dan lengkap. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat berpikir lebih kreatif untuk menemukan jawaban atas tantangan yang mungkin berkembang dalam menjalankan tanggung jawabnya (Bisthomi, Saptono, & Suharto, 2016).

Pemerintah dan swasta pada titik tertentu memiliki karakteristik, kualitas, dan kepentingan yang berbeda dalam penyelenggaraan Public Private Partnership (PPP). Perbedaan ini banyak menghadirkan tantangan yang menyebabkan banyaknya kasus dalam penyelenggaraan Public Private Partnership (PPP) menjadi tidak efektif (Rifai, 2016). Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah permasalahan tertentu dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien oleh pemerintah dan swasta secara bersama-sama dibandingkan jika diatasi oleh pemerintah dan swasta secara masing-masing (Kouwenhaven dalam Kooiman, 1993). Dalam skenario ini, kompetensi pemerintah merupakan aspek penting dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang efektif. Pemerintah harus meningkatkan kemampuannya, yang meliputi kemampuan untuk mengidentifikasi proyek yang akan dibiayai oleh Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) (misalnya, proyek dengan nilai sosial tinggi), menentukan karakteristik layanan, menyepakati ketidakseimbangan, bekerja dengan rincian kontrak, dan berinvestasi dalam kontrak. Akibatnya, semakin kapasitas pemerintah untuk memahami fitur dan pendanaan Public Private Partnership (PPP), semakin efektif inisiatif bersama yang dikelolanya (Maramis, 2018).

Pembentukan Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) akan mengakibatkan penurunan atau penurunan aktivitas kepemilikan pemerintah dalam suatu layanan atau industri tertentu yang disebabkan oleh keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan layanan atau infrastruktur (Putra, 2018). Dalam situasi ini, sektor swasta diharuskan untuk mengawasi dan akan diberi kompensasi untuk menjalankan tanggung jawab seperti keuangan, pengembangan, dan pengelolaan aset, ketika ada pengalihan tugas dari sektor publik ke perusahaan swasta (perusahaan swasta). Akibatnya, risiko yang terkait dengan pelaksanaan fungsi harus ditanggung oleh sektor swasta (Akintoye, Beck, dan Mohan, 2016).

Skema pelaksanaan *Public Private Partnership* pemerintah dan sektor swasta dapat dilihat dari adanya fenomena kerjasama pembangunan infrastruktur yaitu salah satunya proyek penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan PLTP Patuha 2 di Kabupaten Bandung. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) telah menjelaskan jenis infrastruktur yang dapat dikolaborasikan dengan skema KPBU/KPS dalam buku saku Public Private Partnership (PPP) atau Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) di pelaksanaan penyediaan infrastruktur publik. Infrastruktur kelistrikan salah satunya.(BAPPENAS, 2019).

Proyek PLTP Patuha 2 ini masuk dalam program implementasi dari kebijakan Infrastruktur Pemerintah untuk percepatan pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik guna memenuhi kebutuhan sumber daya listrik bagi masyarakat secara luas, dengan menggunakan Energi Terbarukan PT. PLN selaku penyelenggara Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK), dalam prakteknya dapat menyelenggarakan PIK sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perpres No. 4 Tahun 2016 melalui 2 metode, yaitu swakelola dan kerjasama penyediaan tenaga listrik. Dalam proyek pembangunan PLTP Patuha 2, PT. PLN menggunakan metode kerjasama penyediaan tenaga listrik dengan menggandeng PT. Geo Dipa Energi sebagai Pengembang Pembangkit Listrik (GDE, 2021). PT. Geo Dipa Energi meskipun menyandang status sebagai BUMN, akan tetapi dalam konteks kerjasama antara pemerintah (public) dan badan usaha (private), dianggap sebagai mitra bagi pemerintah.

Pada kasus pembangunan PLTP Patuha 2, dimana koordinasi antara pemerintah dan swasta diketahui tidak berjalan dengan baik, perlu terlebih dahulu diketahui bagaimana sebenarnya strategi dan model Public Private Partnership (PPP) yang diselenggarakan. Untuk mengetahui penyelenggaraan strategi PPP ini, dapat diketahui dengan menggunakan tolak ukur karakteristik penyelenggaraan PPP secara umum yang dikemukakan oleh Grimsey and Lewis (2004) diantaranya: 1) Participants, 2). Relationship, 3). Resourcing, 4). Sharing, dan 5). Continuity Oleh karena itu, perlu diambil beberapa elemen penting yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan penyelenggaraan Public Private Partnership (PPP) yang diselenggarakan, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menjelaskan bagaimana penyelenggaraan Public Private Partnership (PPP) dalam proyek PLTP Patuha 2.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tambahan yang menitikberatkan pada adanya suatu permasalahan terkait Penyelenggaraan Pemerintah Swasta karena telah dijelaskan secara rinci tentang pembangunan dan pengembangan infrastruktur khususnya pembangunan PLTP Patuha 2 di Kabupaten Bandung yang menggunakan fasilitas Umum Skema Kemitraan Swasta (KPS). Hal ini menggelitik minat peneliti karena telah diuraikan secara rinci tentang pembangunan dan pengembangan infrastruktur khususnya pembangunan PLTP Patuha 2 di Kabupaten Bandung yang menggunakan fasilitas Umum, yang dimana proyek tersebut termasuk dalam program percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) khususnya dalam kepentingan perlistrikan di Jawa Barat.

1. **METHOD**

Teknik kualitatif diterapkan dalam metodologi penelitian. Tujuannya untuk mempresentasikan dan mengkaji secara menyeluruh skenario KPBU Public Private Partnership dalam mendukung kerjasama yang baik antar pihak yang berpartisipasi dalam Proyek PLTP Patuha 2 di Kabupaten Bandung. Pendekatan kualitatif mengacu pada karakteristik kualitas, nilai, atau signifikansi fakta atau fenomena. Hanya linguistik, bahasa, atau kata-kata yang dapat menyampaikan dan menjelaskan atribut, nilai, atau makna ini. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif adalah semacam studi eksploratif yang mengakui dan memahami makna berbagai individu atau kelompok orang yang timbul dari masalah sosial.

Dari segi sifat, penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan analisis deskriptif digunakan untuk memberikan rangkuman fenomena yang terjadi sebelum digali lebih dalam. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang menggunakan data atau sampel yang diperoleh sebagaimana adanya untuk menggambarkan atau menjelaskan tujuan penyelidikan, tanpa memerlukan analisis dan kesimpulan umum (Sugiyono, 2019). Oleh karena itu, berdasarkan data deskriptif yang diperoleh, penelitian ini mencoba melakukan analisis kualitatif, termasuk mendeskripsikan dan menjelaskan strategi Public Private Partnership (PPP) dan kerjasama sektor publik dalam pengembangan proyek PLTP Patuha 2.

1. **RESULT AND DISCUSSION**

**iFaktor-faktor yang menyebabkan strategi *Public Private Partnership* (PPP) dan Koordinasi Sektor Publik dalam Proyek PLTP Patuha 2 Kabupaten Bandung belum efektif**

Secara historis, kerjasama Public Private Partnership (PPP) antara PT. Geo Dipa Energi (GDE) dan PT. PLN Persero dalam pengembangan dan pengelolaan PLTP Patuha 2 baru dimulai pada tahun 2009, sejak PT. GDE secara penuh berdiri sendiri sebagai sebuah BUMN. Kerjasama antara PT. PLN dan PT. GDE secara sederhana dapat dijelaskan bahwa PT. PLN membangun PT. GDE dan mendorong menjadi sebuah BUMN panas bumi. Tujuan pembentukan PT. GDE adalah utnuk mengelola panas bumi sehingga menjadi energi listrik untuk digunakan oleh PT. PLN. Dalam posisi ini, PT. GDE menjadi salah satu pemasok energi listrik bagi PT. PLN yang menjadi single buyer bagi PT. GDE.

Kerjasama yang dilakukan tanpa negosiasi yang ada hanya penyelarasan seputar Kwh dan harga atau tarif listrik dan sebuah kontrak yang jelas harus ada dalam sebuah kerjasama. Kontrak dalam kerangka Public Private Partnership (PPP) dibuat dalam kerangka manajemen resiko (Grimsey & Lewis, 2004). Jenis kontrak antara PLN dan GDE adalah kontrak berkelanjutan (whole-life cycle contract). Dalam kerangka kerjasama PPP, komitmen yang tercipta menjadi indikator untuk melakukan manajemen resiko. Kemdudian PTPN VIII sebagai pemilik areal sudah semestinya dilibatkan dalam proyek ini, yang ada sekarang ini ada negosiasi tetapi hanya sebatas masukan terkait areal saja yaitu komitmen yang terkait dengan Areal eksplorasi dan dampaknya.

Dalam pelaksanaan proyek Patuha 2 ini melibatkan kerjsama beberapa sektor termasuk diantaranya sektor private maupun sektor publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa, dalam proyek pembangunan Patuha 2 ini, PT. Geo Dipa Energi selaku pembangun proyek ini tidak hanya PT. Geodipa saja dalam pelaksanaan pembangunannya, akan tetapi bekerjasama juga dengan melibatkan pihak lain seperti private sektor atau perusahaan swasta lain untuk menjadi join kontraktor dalam proyek ini serta lembaga-lembaga di wilayah masyarakat. Dalam pelaksanaan kerjasama atau mekanisme pelaksanaan Public Private Partnership (PPP) ini, terdapat proses negosiasi melalui adanya komitmen didalamnya.

Kerangka kerjasama *Public Private Partnership* (PPP) dalam proyek pengembangan energi baru dan terbarukan mulai berkembang dalam 10 tahun terakhir. Salah satu sumber daya yang penting untuk disharing antara masing-maisng pihak adalah suber daya dalam bentuk teknologi. Dunia saat ini berlomba mengembangkan teknologi yang efektif dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya energi baru dan terbarukan. Dalam kerjasama PLN dan GDE, sharing teknologi terjadi, hal ini menunjukan bahwa kerjasama ini tidak hanya bertujuan untuk menciptaan pelayanan publik yan baik, tetapi jua menghasilkan teknologi pengembangan energi baru dan terbarukan yang efektif sesuai dengan kondisi di Indonesia. Penggunaan green technology pada pengembangan Patuha 2 yang diterapkan oleh GDE dan PLN tidak hanya sebatas pada sharing pengetahuan saja, tetapi juga meliputi penggunaan alat, teknik pengeboran, teknik pengolahan panas bumi menjadi energi listrik, serta teknik pengolahan limbah. Disamping itu, PLN melalui divisi EDP, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang dimilikinya untuk mampu mengembangkan energi baru dan terbarukan yang berkelanjutan.

Dalam posisi GDE, pekerjaan yang dilakukan untuk tujuan swasta adalah pekerjaan memproduksi listrik dari energi panas bumi, untuk kemudian dijual kepada PLN sebagai single buyer. Dari transaksi dengan PLN tersebut, GDE diharapkan memperoleh profit sebagai bentuk tanggung jawab GDE kepada investor, PTPN VII hanya menyiapkan areal eksplorasi saja karena merasa tidak berkompeten terkait dengan teknis eksplorasi sehingga tidak memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki walaupun dalam hal ini PTPN VII ingin berpartisipasi dalam mendukung program Listrik Nasional.

PT. Geo Dipa Energi menjelaskan bahwa, memang dasar dari adanya kerjasama ini yakni memberikan dukungan atau suppor dari setiap mitra. Oleh karena itu memang adanya sisi perbedaan antara sumberdya yang diberikan oleh para kontraktor/perusahaan swasta dengan pihak masyarakat. PT. Geo Dipa Energi menjelaskan dengan cukup memberikan kejelasan dalam pengembangan sumber daya manusia khususnya pihak tenaga kerja lokal. Artinya pihak PT. Geodipa sendiri berupaya untuk adanya *feedback* ke masyarakat di wilayah terdampak proyek Patuha 2. Dalam hal ini, PT Geodipa lebih memfokuskan untuk memberika penguat kepada tenaga kerja lokal untuk memiliki *skill*. Hal tersebut memberikan kepastian terkait dengan pelaksanaan *Public Private Partnership* (PPP) untuk adanya perhantian terkait dukungan terhadap tenaga kerja lokal/masyarakat untuk sama-sama memiliki umpan balim yang baik dengan perjanjian dengan pihak pemberi modal dan memang secara jelas perlunya komitmen untuk tujuan pelayanan publik maupun swasta.

Hubungan kontraktual dalam kerjasama Public Private Partnership (PPP) antara PLN dan PT. Geo Dipa Energi menunjukan bahwa kerjasama ini memiliki konsekuensi hukum yang mengikat kedua belah pihak. Terpenuhinya kepentingan bersama adalah syarat awal kerjasama Public Private Partnership (PPP). Swasta dan pemerintah pada dasarnya memiliki orientasi kepentingan yang berbeda, oleh karena itu kerjasama PPP harus menemukan sebuah titik temu dimana kepentingan pemerintah dan swasta dapat saling bertemu dan terpenuhi satu sama lain. Dalam kasus PLN dan PT. Geo Dipa Energi titik temu kepentingan terdapat pada komitmen bersama yang dijalankan secara terpadu.

PTPN VIII tidak memiliki tanggung jawab terkait operasional, namun terkait hasil, PTPN VIII akan mendapat revenue sebesar 2,8 M per tahun. PTPN VIII mendukung program listrik nasional. PTPN VIII lebih mementingkan hubungan simbiosis-mutualisme dalam kerjasama tersebut. Kejelasan pembagian tanggung jawab dan risiko atas hasil, PTPN VIII menjelaskan bahwa itu sesuai dengan adanya komitmen diawal yang memberikan penguatan bahwa, perlunya keterbukaan informasi dan inklusivitas serta pelayanan penanganan keluhan yang akan memberikan kejesalan mengenai tanggung jawab kepada mitra kerja, maupun masyarakat sekitar. PTPN VIII memberikan ketegasan bahwa hubungan yang terjalin tersbeut sifatnya kontrak dalam kaitannya pelaksanaan Public Private Partnership (PPP) khusunya meyakinkan kepada kepentingan publik/masyarakat. Output kerjasama Public Private Partnership (PPP) adalah tersedianya pelayanan publik yang baik tidak hanya kontrak kerjasama saja yang harus dipatuhi, tetapi segala regulasi yang terkait dengan penyediaan layanan publik tersebut.

Hubungan koordinasi dan direktif seperti yang disampaikan oleh PLN tidak sepenuhnya terkait langsung dengan kerjasama PPP pengembangan Patuha 2. Lembaga pemerintah yang memiliki hubungan langsung terkait Patuha 2 adalah Kementrian ESDM dan Kementrian Keuangan. PLN menunjukan bahwa jika tentang kontrak kerjasama pengembanan Patuha 2, tidak ada hubungan antara PLN Pusat dan daerah. PLN menegaskan bahwa, dalam proyek Patuha 2 PLN hanya memiliki hubungan kontraktual dengan PT. Geo Dipa Energi GDE dan memiliki hubungan koordinatif dengan Kementrian ESDM dan Kementrian Keuangan. PTPN VIII memiliki jalinan hubungan yang baik dengan lembaga lain dalam Proyek PT Geo dipa ini, PTPN VIII aktif menjalin komunikasi secara personal terkait kegiatan- kegiatan non-teknis diluar Proyek PT. Geo Dipa Energi. Hubungan PTPN VIII dengan lembaga lain hanya sebatas hubungan prosedural saja sedangkan hubungan yangterjalinan kemitraan dengan pemerintahan desa memiliki jalinan hubungan yang baik dalam Proyek PLTP Patuha 2 tersebut.

Strategi koordinasi khususnya bagaimana pergerakan dari setiap pelaksnaaan, dan pada dasarnya belum adanya kejelasan terkait dengan bukti dokumentasi yang tertulis dengan baik, PT Geodipa mewadahi setiap usulan-usulan dari setiap mitra dalam proses pembangunan proyek PLTP Patuha 2 ini, yang melibatkan pihak-pihak yang dijadikan penasihat dan perundingan. Dimana PT. Geodipa selaku pemegang kendali bersikap untuk meminta masukan dan perizinan. Pentingnya koordinasi dengan lembaga pemerintah terkait untuk proyek PPP yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. PLN menunjukan bahwa Divisi EDP telah terdiri dari SDM-SDM yang memiliki kapabilitas dalam menangani proyek-proyek penyediaan listrik dengan menggunakan energi baru dan terbarukan. Divisi EBT termasuk divisi yang terbilang baru di dalam organisasi PLN. Divisi ini dibentuk untuk menyikapi kebutuhan pembangunan sumber energi listrik baru bagi PLN dengan menggunakan energi baru dan terbarukan. Peraturan direksi tentang pembentukan divisi ini baru keluar pada tahun 2020. PT. Geodipa menekankan dalam hal tersebut untuk selalu mengupayakan sesuai dengan kebijakan ADB. Argumentasi tersebut tentunya mewakili dari adanya assesment dari pihak ADB dengan komitmen yang dijelaskan tersebut sesuai dengan kebijakan ADB yang dimiliki dan memang bisa jadi terkait dengan prinsip Public Private Partnership (PPP).

**Strategi agar Public Private Partnership (PPP) dan Koordinasi Sektor Publik dalam Proyek PLTP Patuha 2 di Kabupaten Bandung agar berjalan secara efektif**

Menurut hasil kajian, kerjasama antara swasta dan pemerintah dalam mengawal pembangunan proyek PLTP 2 tidak efektif. Berdasarkan kajian terhadap berbagai variabel yang berkontribusi terhadap ketidakefektifan kerjasama swasta dan pemerintah, penulis akan melakukan analisis strategi agar kerjasama swasta dan pemerintah terkait PLTP Patuha 2 dapat berjalan secara efisien. Analisis strategi akan dievaluasi dengan menggunakan pendekatan SWOT.

Dengan menggunakan analisis SWOT, dianalisis ketidakefektifan Kerjasama Pemerintah Swasta dan Koordinasi Sektor Publik pada Proyek PLTP Patuha Unit 2 Kabupaten Bandung sehingga dapat diketahui kekuatan dan kelemahannya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas Kerjasama Pemerintah Swasta dan Koordinasi Sektor Publik di Proyek PLTP Patuha Unit 2 Kabupaten Bandung, juga dilakukan analisis variabel eksternal selain analisis faktor internal. Identifikasi elemen kekuatan, kerentanan, peluang, dan ancaman/tantangan yang diperoleh dari hasil strategi penelitian kualitatif yang dijalankan..

Strategi alternatif ditentukan berdasarkan perpaduan kekuatan internal, kemampuan meraih peluang, dan kemampuan mengatasi ancaman atau masalah eksternal. Pada langkah pencocokan model kerangka perumusan strategi lengkap, komponen internal dan eksternal dapat digabungkan untuk menghasilkan ruang. Peluang dan ancaman eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal, dapat digabungkan untuk menciptakan solusi alternatif yang layak untuk setiap prospek yang dianalisis (layak).

Selain itu, penyusunan matriks EFI dan EFE (Internal Factor Evaluation and External Factor Evaluation) dilanjutkan dengan perhitungan kuadran strategi internal dan eksternal. Menyusun peta posisi Kerjasama Pemerintah Swasta dan Koordinasi Sektor Publik di Proyek PLTP Patuha Unit 2 Kabupaten Bandung, kemudian menyusun strategi alternatif dengan menggabungkan kelompok faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan) dengan kelompok faktor eksternal (Peluang dan Ancaman). Analisis ini didasarkan pada kerangka logis yang dapat mengoptimalkan kekuatan dan kemungkinan. Kemudian mengurangi kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (threats) secara bersamaan. Hasil yang diproyeksikan akan mampu menyeimbangkan faktor internal dan eksternal yang dituangkan dalam matriks SWOT untuk menentukan pendekatan yang optimal.

**Tabel 1. Matrik Analisis EFI dan EFE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **Bobot (B)** | **Rating (R)** | **B x R** | **Asumsi** |
| I | **ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL** |  |  |  |
|  | A. | KEKUATAN |  |  |  |  |
|  |  | - | Visi Misi Perusahaan | 0,25 | 4 | 1,00 |  |
|  |  | - | Tujuan dan strategi perusahaan | 0,23 | 4 | 0,90 |
|  |  | - | Kerangka kerja | 0,18 | 2 | 0,35 |
|  |  | - | Bidang Usaha | 0,18 | 2 | 0,35 |
|  |  | - | Investasi  | 0,18 | 2 | 0,35 |
|  |  |  | **JUMLAH I A** | **1,00** |  | **2,95** |  |
|  | B. | KELEMAHAN |  |  |  |  |
|  |  | - | SDM | 0,15 | 4 | 0,0 |  |
|  |  | - | Pendekatan bebasis masyarakat masih lemah | 0,13 | 3 | 0,39 |
|  |  | - | Strategi komunikasi perusahaan masih kurang | 0,13 | 3 | 0,39 |
|  |  | - | Resistensi kebijakan | 0,12 | 2 | 0,24 |
|  |  | - | Komitmen perusahaan dengan masyarakat | 0,12 | 2 | 0,24 |
|  |  | - | Aspek tanggung jawab perusahaan lemah (hukum, Ekonomi social) | 0,10 | 2 | 0,20 |
|  |  | - | Perlibatan tokoh local masih minim | 0,10 | 2 | 0,20 |
|  |  | - | Belum adanya wadan informasi informal perusahaan | 0,08 | 1 | 0,08 |
|  |  | - | Pendampingan rekayasa social masyarakat belum ada | 0,08 | 1 | 0,08 |
|  |  |  | **JUMLAH I B** | **1,00** |  | **2,41** |  |
| II | **ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL** |  |  |  |
|  | A. | PELUANG |  |  |  |  |
|  |  | - | Perlibatan Instansi Luar (PTPN, ADB, PEMDA) | 0,23 | 4 | 0,92 |  |
|  |  | - | Memberikan benefit bagi masyarakat sekitar | 0,21 | 3 | 0,63 |
|  |  | - | Sumber daya alternative yang ada | 0,15 | 2 | 0,30 |
|  |  | - | Pengembangan potensi  | 0,15 | 2 | 0,30 |
|  |  | - | Menjadi icon nasional untuk daerah terdampak | 0,15 | 2 | 0,30 |
|  |  | - | Terciptanya kolaborasi dalam penanganan CSR | 0,11 | 1 | 0,11 |
|  |  |  | **JUMLAH II A** | **1,00** |  | **2,56** |  |
|  | B. | ANCAMAN |  |  |  |  |
|  |  | - | PTPN tidak memiliki kewenangan memberikan perijinan | 0,15 | 4 | 0,61 |  |
|  |  | - | Masyarakat tidak mendukung kepada kebijakan dimaksud | 0,13 | 3 | 0,39 |
|  |  | - | Menjadi competitor dari existing BUMN | 0,12 | 3 | 0,36 |
|  |  | - | AMDAL | 0,12 | 3 | 0,36 |
|  |  | - | Duplikasi program kegiatan antara PLN dan PT GEO DIPA | 0,11 | 2 | 0,22 |
|  |  | - | Daya saing harga pemenuhan kelistrikan  | 0,11 | 2 | 0,22 |
|  |  | - | Berkurangnya lahan milik PTPN, dalm hal penggunaan kawasan hutan | 0,10 | 2 | 0,20 |
|  |  | - | Disparitas pembangunan wilayah kabupaten kota | 0,08 | 1 | 0,08 |
|  |  | - | Parubahan sosial kemasyarakatan | 0,07 | 1 | 0,07 |
|  |  |  | **JUMLAH** | **1,00** | **-** | **2,51** |  |

Sumber : Hasil Focus Group Discussion, penelitian kualitatif, 2022 diolah.

Matriks Hasil Analisis EFI dan EFE, berdasarkan Tabel 1, memberikan kekuatan dan kelemahan (sebagai sumbu X dalam kuadran strategi), khususnya, Kekuatan (S) - Kelemahan (W) = 2,95 - 2,41 = 0,54. Sedangkan selisih antara komponen peluang dan ancaman (yang diwakili oleh sumbu Y pada kuadran strategi) adalah 2,56 - 2,51 = 0,05. Hasilnya, titik kuadran strategi (X,Y) memiliki nilai (0,54, 0,05), menunjukkan peta posisi yang mendukung pendekatan agresif untuk keberhasilan kinerja Proyek PLTP Unit 2 Patuha di Kabupaten Bandung. Selain faktor internal berupa kekuatan yang dimiliki Proyek PLTP Patuha Unit 2 Kabupaten Bandung, dapat dikatakan faktor eksternal Proyek PLTP Patuha Unit 2 Kabupaten Bandung memiliki peluang yang cukup besar, namun harus kita waspadai bahwa ancaman dari luar juga berperan cukup besar.

Kemudian seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1, peta strategi proyek PLTP Patuha Unit 2 Kabupaten Bandung dijelaskan sebagai berikut::



**Gambar 1 Peta Posisi Strategi *Public Private Partnership* dan Koordinasi Sektor Publik dalam Proyek PLTP Patuha Unit 2 Kabupaten Bandung**

Secara umum, penulis percaya bahwa rencana Pemerintah Kabupaten Bandung didasarkan pada fakta dan deskripsi sebelumnya agar *Public Private Partnership* dan Koordinasi Sektor Publik dalam Proyek PLTP Patuha Unit 2 Kabupaten Bandung berjalan efektif adalah sebagai berikut:

1. *Planning Coorporate* yaitu sistem perencanaan pembangunan Proyek PLTP Patuha Unit 2 Kabupaten Bandung dengan membangun *Public Private Partnership*. Melibatkan Bupati Bandung dan seluruh anggota tim dalam Proyek PLTP Patuha Unit 2 Kabupaten Bandung, semua keputusan terkait dokumen perencanaan dibuat dengan cermat dan mendalam, serta dibuatkan Memorandum of Understanding (MoU) dan ditandatangani oleh Bupati dan seluruh tim anggota serta didalam nya memuat tentang penguatan visi misi perusahaan harus lebih melibatkan instansi luar. Dalam menjamin terlaksanannya strategi Perusahaan hendaknya memperhatikan juga benefit bagi masyarakat sekitar.Melibatkan masyarakat mulai dari saat pembangunan sampai perekrutan tenaga kerja lokal. Sosialisasi merupakan langkah penting dalam mengantispasi adanya resitensi. Rebut hati masyarakat dengan sebuah komitmen. Dalam menjadikan PLTP Patuha 2 sebagai ikon, maka tokoh masyarakat harus di ikutsertakan.
2. *Cost Alternative* sebagai penguatan permodalan usaha dan membuka terobosan perluasan peluang disamping telah dipilihnya investor yang akan bekerjasama. Memasukan keterangan dalam kerangka kerja bahwa kehadiran PLTP sebagai sumber tenaga alternatif.
3. *Network Government*. Kebersamaan baik pemerintah, swasta dan masyarakat menunjukkan adanya dukungan dan pemanfaantan sumberdaya penting dalam pembangunan bangsa dan penyelenggaraan pelayanan publik. Perlu adanya pengembangan bidang usaha, menjadikan perusahaan sebagai ikon adalah investasi, penyaluran CSR untuk kepentingan masyarakat lokal. Pemanfaatan CSR sebagai rekayasa sosial.
4. *Communication*. Kita harus memiliki dedikasi dan konsistensi yang tinggi untuk mensukseskan Proyek PLTP Patuha Kabupaten Bandung agar dapat memahami konsepnya dengan baik. SDM dapat didukung dengan meminta bantuan dari mereka yang memiliki rekam jejak kesuksesan yang terbukti
5. **KESIMPULAN**

Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan Koordinasi Sektor Publik dalam Proyek PLTP Patuha 2 di Kabupaten Bandung belum berhasil karena buruknya koordinasi antara sektor publik dan swasta. Milik Pemerintah Swasta (KPS) dipegang. Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) dapat dianggap dari perspektif organisasi dan kerangka kerja organisasi. Dari perspektif ini, teori tata kelola dan jaringan dapat menawarkan landasan untuk studi tentang fenomena KPS. Pertimbangan harus diberikan pada konstruksi dan proses dinamis dalam pelaksanaan kemitraan publik-swasta (KPS). Beberapa taktik yang dapat digunakan pada Proyek PLTP Patuha 2 Kabupaten Bandung untuk mendapatkan hasil yang sukses: 1). Perusahaan Perencanaan. Semua makalah perencanaan dibuat dengan cermat dan mendalam dengan partisipasi manajemen senior; 2) Biaya Alternatif. Selain memiliki investor yang akan menyambut mereka, untuk menambah modal perusahaan dan memberikan prospek terobosan; Jaringan Pemerintah (3). Kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat menunjukkan adanya dukungan dan sumber daya yang penting bagi terselenggaranya pelayanan publik; 4) Komunikasi. agar dapat memahami konsep Proyek PLTP Patuha Unit 2 Kabupaten Bandung secara utuh dan akurat serta memiliki komitmen dan konsistensi yang tinggi terhadap keberhasilan program yang dilaksanakan.

**REFERENCES**

Akintoye, A., Beck, M., & Kumaraswamy, M. (Eds.). (2015). Public private partnerships: a global review.

Ayu, Y., Fatmawati, F., & Nasrulhaq, N. (2021). Public Private Partnership Dalam Penerapan Terminal Parkir Elektronik (Tpe) Di Pd Parkir Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, *2*(3), 787-800.

BAPPENAS. (2019). Buku Saku KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur. Retrieved https://northsumatrainvest.id/data/pdf/publication/BAPPENAS BUKU SAKU KPBU DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR 2019.pdf

Bisthomi, I., Saptono, H., & Suharto, R. (2016). Tinjauan Yuridis Perjanjian Publik Private Partnership (Ppp) Antara Pemerintah Dengan Swasta Dalam Penyedian Infrastruktur Dengan Skema Build Operate Transfer (BOT)(Studi Kasus di PT PLN (Persero). *Diponegoro Law Journal*, *5*(2), 1-12.

Creswell, J. W. (2016). *Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 5.

Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *5*(2), 8-21.

Fatmawati, F. (2011). Kemitraan Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Penjelajahan Teoritik. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *1*(2).

Fauzela, D., Sutiyoso, B., & Putra, S. (2019). Public-Private Partnership (PPP) as An Effort For Radin Inten II Lampung Selatan Airport Development. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, *7*(1), 87.

Grimsey, D., & Lewis, M. K. (2004). The governance of contractual relationships in public–private partnerships. *Journal of corporate citizenship*, (15), 91-109.

Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. Deepublish.

Maramis, J. B. (2018). Faktor Faktor Sukses Penerapan KPBU Sebagai Sumber Pembiayaan Infrastruktur: Suatu Kajian. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi).*, *5*(1).

PT. Geo Dipa Energy, 2021, *Laporan Progress Patuha 2-Februari 2021*. Bandung: PT. Geo Dipa Energi.

PUTRA, A. P. (2018). *Model Public Private Partnership Pada Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan di Jawa Timur Dalam Konteks Open Government* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Rifai, B. (2016). Kendala Implementasi Ppp Kelistrikan dan Kebutuhan Perbaikan Kebijakan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, *24*(1), 51-66.

Rukayat, Y. (2017). Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan pasirjambu. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, *11*(2).

Siswanta, S., & tri Haryanto, A. (2017). Public-Private Partnership Dalam Pengelolaan Museum Radya Pustaka Surakarta Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, *5*(2), 25-50.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.